

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka negara harus memikirkan penerimaan dan pembiayaan dalam mengatur penggunaan alokasi untuk pembangunan nasional. Salah satu dalam mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo dan Ilyas, 2004). Pajak digunakan untuk pembangunan yang nantinya akan dinikmati bersama.

Dalam literatur pajak sering disebutkan fungsi pajak ada dua yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgeter* berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang diperoleh dari pemungutan pajak yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, yaitu pengeluaran rutin dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan dan investasi bagi pemerintah. Sedangkan fungsi *regulerend* suatu fungsi yang digunakan untuk mengatur suatu kebijakan pajak yang digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tujuan tertentu.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan

undang-undang nomor 12 tahun 1994 dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dimana PBB menjadi pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak yang berpotensi mendukung Pendapatan Asli Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan/atau bangunan (Pardi, 2008).

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya yang meliputi tanah, perairan pedalaman termasuk rawa-rawa tambak pengairan serta laut kabupaten/kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Pada tahun 2012 Kabupaten Sukoharjo secara mandiri mengelola Pajak Bumi dan Bangunan yang disahkan lewat Perda nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak daerah, dimana pengelolaan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan dikelola secara mandiri pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai pajak daerah. Secara berkala sesuai dengan dikeluarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, peraturan akan diberlakukan sebagai pajak daerah akan diterapkan secara berkesinambungan oleh pemerintah Kabupaten/kota diseluruh Indonesia pada tahun 2015.

Salah satu ukuran keberhasilan perpajakan yang sesuai dengan fungsi *budgeter* pajak adalah keberhasilan penerimaan pajak (*collection rate*). Keberhasilan penerimaan pajak adalah rasio tingkat kepatuhan pembayaran pajak dibandingkan ketetapannya pada tahun yang bersangkutan, semakin tinggi tingkat kepatuhan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak dan akan mengakibatkan semakin tinggi tingkat keberhasilan penerimaan pajak.

Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Didik, 2010).

Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya perilaku kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan dalam UU Perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada

Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak (Devano dan Rahayu, 2006: 112). Sehingga sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan dan meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siswadi (2008) dengan judul Pengaruh Faktor *Tax Payer* Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo adapun perbedaannya yaitu merubah wilayah penelitian di lingkup kecamatan yang berbeda dan penelitian dari Mu'minatus (2005) dengan judul perilaku wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Variabel tingkat kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak, dan kemampuan wajib pajak adapun perbedaannya dengan menambah variabel persespsi wajib pajak terhadap pengenaan sanksi.

Berdasar uraian diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul,  
 ”PENGARUH FAKTOR WAJIB PAJAK TERHADAP KEBERHASILAN

## PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO”.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
- b. Apakah pemahaman wajib pajak terhadap undang undang dan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
- c. Apakah persepsi wajib pajak terhadap pengenaan sanksi pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
- d. Apakah pendapatan wajib pajak perpajakan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
- e. Apakah terdapat perbedaan potensi penerimaan PBB sebelum adanya pemberlakuan Undang-undang pajak daerah dan setelah diberlakukan Undang-undang pajak daerah pada tahun 2012.

### **C. Tujuan Peneilitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

- a. Untuk menganalisis adanya pengaruh kesadaran perpajakan terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
- b. Untuk menganalisis adanya pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap undang undang dan peraturan perpajakan perpajakan terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
- c. Untuk menganalisis adanya pengaruh persepsi wajib pajak terhadap pengenaan sanksi terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
- d. Untuk menganalisis adanya pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
- e. Untuk mengetahui adanya perbedaan potensi penerimaan PBB sebelum adanya pemberlakuan Undang-undang pajak daerah dan setelah diberlakukan Undang-undang pajak daerah pada tahun 2012.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan pemasukan penerimaan PBB pada peran masyarakat setempat.

- b. Bagi kalangan akademis dan dunia pendidikan untuk menambah wawasan keilmuan di bidang PBB dan sebagai referensi bagi mahasiswa yang berminat dalam penelitian yang serupa.

## **E. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, maka dibuat rancangan penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas landasan teori yang berupa penjelasan yang mendasari penelitian ini, serta hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan pengaruh faktor wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Disamping itu pada bagian ini diuraikan pula penelitian sebelumnya dan penurunan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini merupakan landasan metode penelitian, yang merupakan acuan analisis ilmiah dalam mewujudkan hasil penelitian yang mencakup pemilihan sampel, sumber data, variabel

penelitian, metode analisis data, dan pengujian hipotesis. Pembentukan model regresi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam hipotesis. Selain itu bagian ini juga menjelaskan prosedur dan kriteria data untuk pengujian kelayakan penggunaan data yang diambil dalam penelitian.

#### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis mencoba menganalisa dan membahas pengaruh wajib pajak terhadap pengaruh keberhasilan penerimaan PBB berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil penelitian.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya keterbatasan dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.